

# Transformasi Penyuluhan Sosial Berbasis Sistemik Untuk Penguatan Pilar-Pilar Sosial Di Era Disrupsi

Joyakin Tampubolon

STIA Menarasiswa Bogor, Indonesia

E-mail : joyipb2000@gmail.com

## ABSTRACT

The disruption era has brought rapid changes in social, economic, and technological landscapes, requiring social extension services to undergo innovative and systemic transformation. Social extension plays a strategic role in strengthening the capacity of social pillars such as TKSK, PKH Facilitators, Community Social Workers, Tagana, Karang Taruna, and other volunteers to address the complexity of community-level social problems. However, approaches that remain partial and sectoral have proven insufficient to effectively respond to these challenges. This study employs a descriptive-analytical method through literature review, policy analysis, and thematic examination of case studies on the implementation of social extension in various regions. The findings indicate that the transformation of social extension requires integration of development communication, utilization of digital technology, capacity strengthening of human resources, and multi-actor cross-sectoral collaboration. The application of system thinking has proven to enhance the effectiveness of information delivery, actor coordination, and program sustainability. The study concludes that systemic-based transformation of social extension is a prerequisite for strengthening social pillars in the future. Recommendations emphasize regulatory reinforcement, development of adaptive technology-based extension models, and continuous capacity building of social pillars to face disruption era challenges with resilience, inclusiveness, and sustainability.

**Keywords:** social extension, systemic approach, social pillars, transformation, digital technology, system thinking.

## ABSTRAK

Era disrupsi membawa perubahan cepat dalam lanskap sosial, ekonomi dan teknologi yang menuntut penyuluhan sosial bertransformasi secara inovatif dan sistemik. Penyuluhan sosial memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas pilar-pilar sosial seperti TKSK, Pendamping PKH, PSM, Tagana, Karang Taruna dan relawan sosial lainnya untuk mengatasi kompleksitas permasalahan sosial di tingkat komunitas. Namun, pendekatan yang masih parsial dan sektoral terbukti kurang mampu menjawab tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode *descriptive-analytical* melalui studi literatur, telaah kebijakan dan analisis tematik terhadap studi kasus implementasi penyuluhan sosial di berbagai daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi penyuluhan sosial memerlukan integrasi antara komunikasi pembangunan, pemanfaatan teknologi digital, penguatan kapasitas SDM serta kolaborasi multi-aktor lintas sektor. Penerapan *system thinking* terbukti meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, koordinasi antar-aktor serta kesinambungan program pemberdayaan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa transformasi penyuluhan sosial berbasis sistemik merupakan prasyarat penguatan pilar-pilar sosial di masa depan. Rekomendasi diarahkan pada penguatan regulasi, pengembangan model penyuluhan adaptif berbasis teknologi dan peningkatan kapasitas pilar-pilar sosial agar mampu menghadapi tantangan era disrupsi secara tangguh, inklusif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** penyuluhan sosial, pendekatan sistemik, pilar sosial, transformasi, teknologi digital, *system thinking*.

## PENDAHULUAN

Era disrupsi yang ditandai dengan percepatan teknologi digital, globalisasi informasi dan perubahan struktur sosial-ekonomi telah menciptakan dinamika baru dalam kehidupan masyarakat. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan otomatisasi, Internet of Things (IoT), big data dan

kecerdasan buatan telah mengubah pola interaksi, komunikasi serta akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik. Di Indonesia, perubahan ini berdampak langsung terhadap pola kehidupan sosial, termasuk meningkatnya kesenjangan digital, kerentanan kelompok miskin dan rentan serta kompleksitas masalah sosial seperti kemiskinan multidimensi, pengangguran, ketidaksetaraan gender, kekerasan berbasis komunitas, hingga ancaman bencana alam dan non-alam. Kondisi ini menuntut penyuluhan sosial, sebagai salah satu instrumen pembangunan kesejahteraan sosial, untuk bertransformasi agar tetap relevan dan mampu memberikan solusi yang adaptif.

Penyuluhan sosial secara konseptual adalah proses komunikasi pembangunan yang bertujuan mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat agar berdaya menghadapi persoalan hidupnya. Dalam praktik di Indonesia, penyuluhan sosial dilakukan melalui pilar-pilar sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Karang Taruna dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan pilar-pilar sosial lainnya. Pilar-pilar sosial ini merupakan kekuatan gotong royong bangsa yang tersebar hingga tingkat desa dan kelurahan. Namun, di era disrupsi, fungsi penyuluhan sosial yang seharusnya menjadi motor perubahan sosial sering kali belum optimal. Banyak kegiatan penyuluhan sosial masih bersifat seremonial, berorientasi proyek dan terfokus pada penyampaian informasi satu arah. Hal ini membuat pesan penyuluhan kurang menggugah kesadaran kritis masyarakat dan tidak mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan (Sumardjo & Saharudin, 2020).

Kinerja penyuluhan sosial yang belum maksimal juga dapat dilihat dari keterbatasan kapasitas pilar-pilar sosial di lapangan. Sebagai contoh, banyak TKSK dan PSM yang masih bekerja dengan keterbatasan sarana, prasarana serta kompensasi, sehingga penyuluhan lebih menekankan pada penyampaian program daripada pemberdayaan berbasis kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, meskipun era digital membuka peluang pemanfaatan media sosial, aplikasi daring dan platform komunikasi interaktif, sebagian besar penyuluh sosial masih gagap teknologi dan belum mampu memanfaatkan transformasi digital sebagai instrumen efektif dalam penyuluhan. Padahal, studi Lestari (2021) menunjukkan bahwa penggunaan media digital dalam penyuluhan dapat meningkatkan jangkauan, partisipasi dan efektivitas komunikasi pembangunan di tingkat akar rumput.

Selain keterbatasan individu, kelembagaan penyuluhan sosial juga masih menghadapi tantangan serius. Regulasi yang ada, seperti UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Permensos No 10 tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial, sebenarnya menekankan pentingnya penyuluhan sebagai salah satu strategi utama pembangunan kesejahteraan sosial. Namun, kebijakan turunannya sering kali belum konsisten, fragmentaris dan kurang mendukung kolaborasi lintas sektor. Akibatnya, kelembagaan penyuluhan masih bersifat sektoral, di mana masing-masing instansi bekerja sendiri-sendiri tanpa koordinasi lintas kementerian atau pemerintah daerah. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih program, inefisiensi sumber daya dan tidak adanya jaminan kesinambungan kelembagaan penyuluhan sosial di masa mendatang (Hikmat, 2019). Jika situasi ini dibiarkan, penyuluhan sosial akan kehilangan relevansi strategisnya sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat.

Dalam menghadapi realitas tersebut, dibutuhkan pendekatan baru yang lebih holistik, adaptif dan terintegrasi. Pendekatan sistemik atau *system thinking* menjadi pilihan strategis karena memungkinkan penyuluhan dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Dengan melihat interaksi antara input, proses, output, outcome dan umpan balik, penyuluhan sosial dapat diatur sedemikian rupa agar setiap elemen – mulai dari kebijakan, SDM, kelembagaan, hingga teknologi – berfungsi secara sinergis. Transformasi penyuluhan sosial berbasis sistemik tidak hanya menjawab tantangan disrupsi, tetapi juga memperkuat kapasitas pilar-pilar sosial untuk menjadi agen perubahan yang lebih tangguh, inovatif dan berkelanjutan.

*Masalah Penelitian.* Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah (1) Bagaimana bentuk transformasi penyuluhan sosial yang relevan dalam merespons tantangan era disrupsi?; (2) Bagaimana penerapan pendekatan sistemik dapat memperkuat kapasitas pilar-pilar sosial di Indonesia?

*Tujuan Penelitian.* Adapun Tujuan penulisan dari makalah ini adalah: (1) Mendeskripsikan urgensi transformasi penyuluhan sosial berbasis sistemik dalam konteks era disrupsi; (2) Menganalisis strategi penguatan pilar-pilar sosial melalui penyuluhan sosial berbasis sistem.

*Manfaat Penelitian.* Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut (1) *Teoretis:* Memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Penyuluhan Pembangunan, khususnya penyuluhan sosial, dengan memperkaya perspektif sistemik dalam kajian akademik dan penelitian; (2) *Praktis:* Memberikan rekomendasi kebijakan dan model implementasi kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia serta para pemangku kepentingan lain, sehingga transformasi penyuluhan sosial dapat dilaksanakan secara efektif, adaptif dan berkelanjutan

## METODE

Makalah ini disusun berdasarkan *penelitian kualitatif* dengan pendekatan *descriptive-analytical* yang menekankan pada kajian literatur, telaah kebijakan serta analisis data sekunder yang relevan dengan topik penyuluhan sosial. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah memahami fenomena transformasi penyuluhan sosial berbasis sistemik dalam konteks era disrupsi, bukan sekadar mengukur variabel-variabel secara kuantitatif. Sejalan dengan pandangan Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi makna yang muncul dari pengalaman sosial, kebijakan maupun dinamika kelembagaan, sehingga sesuai untuk menggali kompleksitas penyuluhan sosial yang multidimensi.

Jenis penelitian ini juga memiliki karakter sebagai studi literatur (*literature review*) dan telaah kebijakan (*policy analysis*). Studi literatur dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terdahulu terkait transformasi penyuluhan, pendekatan sistemik serta penguatan pilar-pilar sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperoleh landasan konseptual yang kuat dan mampu menempatkan permasalahan penyuluhan sosial dalam kerangka teoritik yang lebih luas (Snyder, 2019). Sementara itu, telaah kebijakan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi, program dan dokumen resmi pemerintah – seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Permensos No. 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial serta Permensos No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesos – yang menjadi instrumen hukum dan kelembagaan dalam penyelenggaraan penyuluhan sosial.

Selain itu, meskipun penelitian ini lebih dominan bersifat kualitatif, terdapat elemen studi kasus yang dipakai untuk memperkaya analisis. Studi kasus digunakan dalam menganalisis praktik penyuluhan sosial di beberapa daerah, misalnya implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun pemanfaatan media digital oleh Karang Taruna dan Tagana dalam penyebaran informasi sosial. Yin (2018) menyebut studi kasus sebagai strategi penelitian yang memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga mengacu pada realitas lapangan yang dapat dipelajari secara empiris.

Kombinasi studi literatur, telaah kebijakan dan studi kasus menjadikan penelitian ini bersifat aplikatif sekaligus teoritis. Dari sisi aplikatif, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi Kementerian Sosial dan pemangku kepentingan lainnya dalam mentransformasi penyuluhan sosial agar lebih adaptif, sistemik dan berbasis teknologi. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu penyuluhan pembangunan dengan menawarkan perspektif baru tentang integrasi pendekatan sistemik dalam penyuluhan sosial di era disrupsi. Dengan demikian, penelitian ini relevan baik bagi pengembangan ilmu maupun praktik kebijakan sosial di Indonesia.

*Pendekatan.* Penelitian ini menggunakan pendekatan *descriptive-analytical*, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis suatu fenomena sosial sekaligus menganalisis makna, hubungan serta implikasi dari fenomena tersebut. Menurut Neuman (2014), pendekatan deskriptif-analitis berusaha tidak hanya mendeskripsikan kondisi apa adanya, tetapi juga menjelaskan pola dan memberikan pemahaman mendalam mengenai mengapa suatu fenomena terjadi. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan *descriptive-analytical* dipilih untuk mengkaji secara kritis bagaimana transformasi penyuluhan sosial dapat diwujudkan melalui pendekatan sistemik guna memperkuat pilar-pilar sosial di era disrupsi.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara aspek konseptual (teori penyuluhan, *system thinking*, pemberdayaan sosial) dengan aspek praktis (implementasi kebijakan, program penyuluhan dan praktik lapangan). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan

gambaran tentang kondisi penyuluhan sosial saat ini, tetapi juga memberikan analisis mengenai faktor-faktor penghambat dan pendorong transformasi. Moleong (2017) menekankan bahwa penelitian kualitatif deskriptif-analitis sangat relevan ketika peneliti ingin memahami makna di balik praktik sosial yang kompleks dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka-angka kuantitatif.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini dilakukan melalui analisis literatur dan kebijakan. Analisis literatur digunakan untuk menelaah hasil-hasil penelitian terdahulu, baik nasional maupun internasional, yang membahas transformasi penyuluhan, pemanfaatan teknologi serta penguatan kapasitas SDM. Analisis kebijakan dilakukan dengan mengkaji regulasi dan instrumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan penyuluhan sosial di Indonesia, seperti UU No. 11 Tahun 2009, Permensos No. 10 Tahun 2014 dan Permensos No. 16 Tahun 2017. Dengan pendekatan analitis, kebijakan tersebut tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga dievaluasi dalam konteks implementasinya di lapangan, apakah sudah mendukung atau justru masih menyisakan kesenjangan.

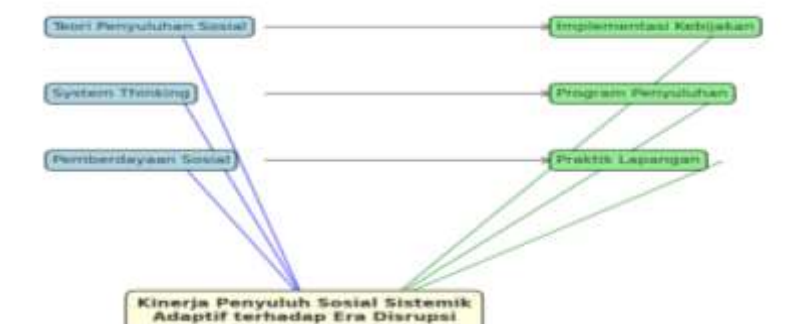
Lebih lanjut, pendekatan descriptive-analytical ini dikaitkan dengan konsep sistemik dan era disrupsi yang ditandai oleh percepatan teknologi digital. Penelitian ini memanfaatkan perspektif sistemik untuk melihat keterhubungan antar komponen penyuluhan sosial – input, proses, output, outcome dan feedback – dalam kerangka pemanfaatan teknologi. Dengan cara ini, penelitian dapat menilai sejauh mana media sosial, aplikasi digital maupun sistem informasi kesejahteraan telah berkontribusi dalam memperkuat efektivitas penyuluhan sosial.

Dengan demikian, pendekatan descriptive-analytical tidak hanya memberikan deskripsi, tetapi juga menghasilkan analisis kritis yang relevan bagi pengembangan konsep dan praktik penyuluhan sosial di Indonesia. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi praktis bagi Kementerian Sosial dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat peran pilar-pilar sosial di tengah tantangan era disrupsi.

Kerangka Pemikiran. Kerangka pikir penelitian ini (Gambar 5) menggambarkan keterkaitan antara aspek konseptual (teori penyuluhan sosial, system thinking, pemberdayaan sosial) dengan aspek praktis (implementasi kebijakan, program penyuluhan dan praktik lapangan). Keterkaitan tersebut membentuk kerangka logis penelitian yang menegaskan bahwa transformasi penyuluhan sosial tidak hanya membutuhkan landasan teoritis, tetapi juga harus terimplementasi dalam kebijakan dan program yang nyata di lapangan.

Pada sisi kiri, aspek konseptual mencakup teori penyuluhan sosial yang menekankan pentingnya perubahan perilaku melalui komunikasi, motivasi, informasi dan edukasi; pendekatan system thinking yang melihat penyuluhan sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung; serta konsep pemberdayaan sosial yang berorientasi pada kemandirian masyarakat. Aspek ini menjadi dasar akademis sekaligus pijakan analisis penelitian.

Keterpaduan antara aspek konseptual dan praktis menghasilkan keluaran berupa kinerja penyuluh sosial yang sistemik, adaptif dan relevan dengan tuntutan era disrupsi. Artinya, penyuluhan sosial tidak lagi bersifat parsial atau sektoral, melainkan terintegrasi dengan dukungan teknologi digital, kolaborasi multi-pihak serta strategi pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan kerangka pikir ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif sekaligus rekomendasi strategis bagi penguatan penyuluhan sosial di Indonesia.



Gambar 1: Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber rujukan

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sumber Data. Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan data sekunder untuk memastikan kedalaman dan keluasan analisis mengenai transformasi penyuluhan sosial berbasis sistemik. Pemilihan kedua jenis data ini penting karena penelitian tidak hanya bertujuan membangun pemahaman konseptual, tetapi juga memberikan gambaran praktis mengenai implementasi penyuluhan sosial di lapangan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, khususnya praktisi dan pejabat Kementerian Sosial yang terlibat langsung dalam perumusan dan implementasi kebijakan penyuluhan sosial. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pilar-pilar sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Karang Taruna. Patton (2015) menekankan bahwa wawancara mendalam merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif untuk menangkap perspektif partisipan secara komprehensif.

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen berupa kebijakan, peraturan perundangan, laporan program dan publikasi akademik. Dokumen kebijakan yang menjadi rujukan utama antara lain UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Permensos No. 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial serta Permensos No. 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesos. Selain itu, laporan program seperti evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) maupun dokumen DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) / DTSN dianalisis untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan. Sementara itu, publikasi akademik berupa buku, artikel jurnal dan prosiding konferensi digunakan untuk memperkuat analisis teoritis dan membandingkan dengan praktik internasional.

Teknik Pengumpulan Data. Terdapat tiga teknik utama yang digunakan, yaitu wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi lapangan. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan aktor kunci mengenai transformasi penyuluhan sosial. Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh pemahaman historis, normatif dan evaluatif terhadap kebijakan penyuluhan. Observasi lapangan dilaksanakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan penyuluhan sosial di tingkat komunitas, sehingga peneliti dapat melihat praktik nyata sekaligus membandingkan dengan kebijakan yang berlaku. Creswell dan Poth (2018) menegaskan bahwa kombinasi teknik ini memberikan validitas triangulasi yang lebih kuat dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik (thematic analysis). Analisis isi digunakan untuk mengkaji dokumen kebijakan, laporan program dan publikasi akademik, dengan fokus pada tema-tema yang relevan dengan transformasi penyuluhan sosial. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dari hasil wawancara dan observasi lapangan. Braun dan Clarke (2006) menjelaskan bahwa analisis tematik memungkinkan peneliti mengorganisasi data kualitatif ke dalam tema-tema yang bermakna, sehingga lebih mudah memahami hubungan antara teori, kebijakan dan praktik.

Dengan kombinasi data primer dan sekunder serta penerapan analisis isi dan analisis tematik, penelitian ini diharapkan menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai transformasi penyuluhan sosial berbasis sistemik. Kerangka metode ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menggambarkan kondisi yang ada, tetapi juga menganalisis secara kritis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam memperkuat pilar-pilar sosial di era disrupsi.

Tahapan Metodologi Penelitian. Bagan alir berikut menjelaskan prosedur penelitian yang digunakan dalam makalah ini. Proses penelitian dimulai dari identifikasi masalah, dilanjutkan dengan studi literatur dan telaah kebijakan untuk memperoleh dasar konseptual. Selanjutnya, pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, jurnal akademik dan laporan program. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi dan analisis tematik. Hasil analisis disintesis untuk menghasilkan interpretasi yang komprehensif, hingga akhirnya memberikan rekomendasi transformasi penyuluhan sosial berbasis sistemik guna memperkuat pilar-pilar sosial di era disrupsi (Gambar 2).



Gambar 2: Tahapan Metodologi Penelitian

Sumber rujukan

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Penyuluhan Sosial Saat Ini. Penyuluhan sosial di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan mendasar meskipun memiliki peran strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil telaah kebijakan, literatur dan laporan program, dapat digambarkan bahwa kinerja penyuluhan sosial belum sepenuhnya optimal dalam menjawab dinamika sosial yang semakin kompleks. Hal ini terlihat dari lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia serta kurangnya pemanfaatan teknologi digital secara sistematis.

Analisis SWOT terhadap penyuluhan sosial menunjukkan adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang perlu dicermati. Dari sisi kekuatan, penyuluhan sosial memiliki basis hukum yang kuat melalui UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Permensos No. 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial, yang menjadi legitimasi kelembagaan dan arah kebijakan. Selain itu, keberadaan pilar-pilar sosial seperti TKSK, PSM, PKH, Tagana dan Karang Taruna memperkuat jejaring sosial hingga tingkat akar rumput. Namun, dari sisi kelemahan, penyuluhan sosial masih dilakukan dengan pola konvensional yang parsial dan sektoral. Penyuluh lebih banyak berfungsi sebagai penyampai informasi (information delivery), bukan sebagai fasilitator partisipasi masyarakat. Kelemahan lainnya adalah keterbatasan literasi digital di kalangan penyuluh maupun pilar-pilar sosial, yang membuat mereka belum optimal memanfaatkan teknologi komunikasi modern (Støren-Vaczy, 2024).

Dari sisi peluang, era disrupsi sebenarnya menyediakan ruang besar untuk transformasi. Perkembangan teknologi digital, media sosial dan big data dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan penyuluhan, meningkatkan interaktivitas serta memperkuat efektivitas program sosial. Penelitian Lestari (2021) menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan mempercepat proses komunikasi pembangunan. Namun, ancaman yang dihadapi cukup serius, seperti risiko maraknya hoaks, rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi serta lemahnya kolaborasi antar aktor dalam sistem penyuluhan sosial.

Disrupsi Penyuluhan Sosial di Masa Mendatang. Meskipun era disrupsi membawa berbagai tantangan, terdapat pula sejumlah keunggulan strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat penyuluhan sosial di Indonesia. Pertama, teknologi digital memberikan peluang besar untuk memperluas jangkauan penyuluhan. Platform seperti media sosial, aplikasi komunikasi daring dan

learning management system memungkinkan penyuluh sosial menjangkau audiens yang lebih luas secara cepat, murah dan interaktif (Schwab, 2016).

Kedua, era disrupsi ditandai oleh ketersediaan big data dan analitik yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy). Dengan pemanfaatan data yang terintegrasi, penyuluh sosial dapat lebih tepat dalam mengidentifikasi kelompok sasaran, merancang intervensi serta mengevaluasi dampak program sosial. Hal ini akan meningkatkan akurasi dan efektivitas penyuluhan (Kitchin, 2014).

Ketiga, perkembangan teknologi membuka ruang bagi inovasi metode penyuluhan. Misalnya, pendekatan gamification, digital storytelling, atau kampanye berbasis video pendek di platform seperti TikTok dan Instagram dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda. Cara ini tidak hanya memperkuat transfer pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam program sosial (Lestari, 2021).

Keempat, era disrupsi menghadirkan peluang untuk kolaborasi multi-pihak yang lebih luas. Pemerintah, akademisi, sektor swasta dan masyarakat sipil dapat bekerja sama melalui platform digital untuk merancang program penyuluhan sosial yang sistemik, inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi ini akan memperkaya sumber daya, memperluas jejaring dan mempercepat proses inovasi.

Dengan berbagai keunggulan ini, era disrupsi justru dapat menjadi momentum untuk melakukan transformasi penyuluhan sosial berbasis sistemik. Jika penyuluh sosial mampu meningkatkan literasi digital dan memanfaatkan teknologi secara optimal, maka penyuluhan sosial tidak hanya akan relevan di masa depan, tetapi juga menjadi motor utama dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat Indonesia.

Gambar 3 Diagram Venn ini memperlihatkan tiga alasan utama urgensi transformasi penyuluhan sosial: (1) perkembangan teknologi, (2) kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan (3) efektivitas program sosial. Ketiganya bertemu pada satu titik yang menunjukkan bahwa transformasi penyuluhan sosial berbasis sistemik menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan era disrupsi (Lestari, 2021; Sumardjo & Saharudin, 2020).



Gambar 3: Diagram Venn Urgensi Transformasi Penyuluhan Sosial

Diagram alur ini (Gambar 3) menunjukkan pergeseran dari kondisi konvensional yang cenderung parsial dan sektoral, menuju tantangan era disrupsi yang ditandai oleh perkembangan teknologi dan kompleksitas masalah sosial (Gambar 4). Jawaban atas tantangan tersebut adalah transformasi penyuluhan sosial berbasis sistemik yang adaptif, partisipatif dan berbasis teknologi (Hall, 2014; Schwab, 2016).



Gambar 4: Alur Transformasi Penyuluhan Sosial

Pendekatan Sistemik dalam Penyuluhan. Pendekatan sistemik menjadi landasan penting dalam upaya mentransformasi penyuluhan sosial di era disrupsi. Dalam perspektif system thinking, penyuluhan tidak dapat dipandang sebagai aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari sistem yang terdiri atas komponen input, proses, output, outcome dan feedback yang saling berinteraksi (Senge, 2006). Dengan kerangka ini, penyuluhan sosial tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penguatan kapasitas sosial yang terintegrasi dengan kebijakan, kelembagaan dan kebutuhan masyarakat.

Penerapan pendekatan sistemik memungkinkan penyuluhan sosial dijalankan melalui tahapan yang lebih terstruktur. Pada tahap input, regulasi, SDM dan teknologi digital menjadi fondasi utama. Pada tahap proses, kegiatan penyuluhan dilaksanakan dengan memadukan komunikasi, motivasi, edukasi dan informasi berbasis digital. Tahap output mencakup meningkatnya literasi sosial masyarakat, sementara outcome diukur dari penguatan ketahanan sosial dan kemandirian komunitas. Feedback diperoleh melalui evaluasi kebijakan dan pemantauan berbasis data untuk memperbaiki program di masa depan (Checkland, 2000).

Kunci lain dari pendekatan sistemik adalah integrasi lintas sektor dan multi-aktor. Penyuluhan sosial tidak mungkin efektif jika hanya dijalankan oleh Kementerian Sosial. Diperlukan keterlibatan berbagai sektor, seperti Kementerian Pendidikan (edukasi masyarakat), Kementerian Kesehatan (penyuluhan gizi dan stunting), Kementerian Pertanian (penyuluhan agromaritim) serta pemerintah daerah sebagai ujung tombak implementasi. Di luar itu, sektor swasta dapat berperan melalui program CSR, perguruan tinggi menyumbang riset dan pengembangan model serta masyarakat sipil memperkuat partisipasi komunitas. Menurut Bryson, Crosby, & Bloomberg (2014), kolaborasi multi-aktor adalah syarat mutlak dalam menghadapi masalah sosial yang bersifat kompleks dan saling terkait.

Integrasi lintas sektor ini menuntut adanya mekanisme koordinasi sistemik, misalnya melalui platform digital terpadu seperti SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) atau dashboard kesejahteraan sosial berbasis big data. Dengan platform ini, semua aktor dapat berbagi data, melakukan koordinasi dan memantau capaian program secara real-time. Penerapan teknologi digital menjadi faktor kunci untuk memastikan kolaborasi lintas sektor berjalan efektif, transparan dan berkesinambungan (Kitchin, 2014).

Pendekatan Sistemik dalam Penyuluhan Sosial. Gambar 5 menunjukkan bahwa penyuluhan sosial sebaiknya dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri atas lima komponen utama: input, proses, output, outcome dan feedback. Input mencakup regulasi, sumber daya manusia dan dukungan teknologi. Proses merujuk pada pelaksanaan penyuluhan melalui komunikasi, motivasi, edukasi dan informasi (KIME) dengan dukungan digital. Output diukur dari meningkatnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat, sementara outcome berupa ketahanan sosial yang lebih kuat dan kemandirian komunitas. Feedback memungkinkan evaluasi berkelanjutan untuk menyempurnakan kebijakan dan program (Checkland, 2000; Senge, 2006).



Gambar 5: Sistem Penyuluhan Sosial

Gambar 5 memperlihatkan peran Kementerian Sosial sebagai pusat koordinasi yang tidak dapat bekerja sendiri. Penyuluhan sosial harus melibatkan integrasi lintas sektor dan kolaborasi multi-aktor, termasuk kementerian lain (Pendidikan, Kesehatan, Pertanian), pemerintah daerah, sektor swasta melalui tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perguruan tinggi, LSM serta pilar-pilar sosial dan masyarakat. Dengan jejaring ini, penyuluhan sosial akan lebih efektif, komprehensif dan mampu menghadapi kompleksitas masalah sosial di era disrupsi (Ansell & Gash, 2008; Bryson et al., 2014).



Gambar 6: Diagram Jaringan Multi-Aktor Penyuluhan sosial

Gambar 6 berupa tabel ringkas yang membandingkan antara penyuluhan sektoral dengan penyuluhan sistemik. Penyuluhan sektoral cenderung terbatas pada instansi tertentu, bersifat top-down dan berdampak parsial. Sebaliknya, penyuluhan sistemik mengedepankan koordinasi lintas sektor, melibatkan banyak aktor, menggunakan pendekatan partisipatif dan berbasis data serta menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan (Tabel 1). Perubahan paradigma ini penting untuk memastikan penyuluhan sosial tetap relevan di tengah perubahan era disrupsi (Head & Alford, 2015).

Tabel 1: Perbandingan Penyuluhan Sektoral vs Sistemik

Aspek	Penyuluhan Sektoral	Penyuluhan sistemik
Koordinasi	Terbatas pada instansi sektoral	Lintas sektor dengan platform terpadu
Aktor	Didominasi Kemensos & Unit terkait	Kemensos+ Kementerian lain + Swasta + LMS + Masyarakat
Pendekatan	Top-down, inovatif	Partisipatif, kolaboratif, berbasis data
Dampak	Cenderung parsial & jangka pendek	Komprehensif, berkelanjutan, adaptif

Sumber rujukan:

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445-456.

*Penguatan Pilar-Pilar Sosial.* Pilar-pilar sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping PKH, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Karang Taruna, dan pilar sosial lainnya merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Namun, kinerja mereka masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kapasitas SDM yang belum merata, rendahnya literasi digital, hingga minimnya dukungan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, strategi penguatan pilar-pilar sosial menjadi agenda penting untuk memastikan penyuluhan sosial berbasis sistemik dapat berjalan efektif di era disrupsi.

*Strategi.* Penguatan kapasitas SDM pilar sosial harus diarahkan pada peningkatan kompetensi teknis, manajerial dan digital. Kompetensi teknis mencakup kemampuan identifikasi masalah sosial, fasilitasi komunitas dan manajemen kasus. Kompetensi manajerial mencakup kepemimpinan lokal, koordinasi lintas sektor serta keterampilan komunikasi publik. Kompetensi digital sangat penting agar pilar sosial mampu menggunakan aplikasi daring, media sosial dan platform data kesejahteraan seperti DTKS, DTSEN atau SLRT (Moleong, 2017; Sumardjo & Saharudin, 2020).

*Pemanfaatan.* Era disrupsi membuka peluang besar bagi pilar sosial untuk mengoptimalkan teknologi digital. Pemanfaatan media sosial (WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram) memungkinkan penyebaran informasi lebih cepat dan interaktif. Aplikasi daring dan dashboard data mendukung monitoring dan evaluasi program secara real-time, sementara big data analytics membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat sasaran (Kitchin, 2014; Lestari, 2021). Penggunaan teknologi ini akan meningkatkan efisiensi kerja pilar sosial sekaligus memperluas dampak penyuluhan.

Kolaborasi. Tidak kalah penting adalah membangun kolaborasi multi-pihak yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, swasta, akademisi dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui forum koordinasi lintas sektor, kemitraan CSR, riset dan pengembangan bersama perguruan tinggi serta dukungan LSM dalam advokasi. Bryson, Crosby, & Bloomberg (2014) menekankan bahwa tata kelola berbasis public value hanya dapat dicapai melalui keterlibatan berbagai aktor yang saling melengkapi. Dengan kolaborasi ini, pilar-pilar sosial tidak bekerja sendiri, tetapi menjadi bagian dari ekosistem yang lebih besar.



Gambar 7: Segitiga Strategi Penguatan Pilar-Pilar sosial

Sumber rujukan

- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445-456.
- Kitchin, R. (2014). *The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences*. London: Sage.

Dengan strategi penguatan SDM, pemanfaatan teknologi dan kolaborasi multi-pihak, pilar-pilar sosial akan memiliki kapasitas yang lebih kuat untuk menjadi agen perubahan sosial. Transformasi penyuluhan sosial berbasis sistemik akan semakin relevan, inklusif dan berkelanjutan serta mampu menghadapi tantangan era disrupsi dengan lebih tangguh.

Penguatan. Gambar 7 ini merupakan segitiga strategi yang menunjukkan bahwa penguatan pilar-pilar sosial hanya dapat efektif apabila dilakukan secara simultan pada tiga dimensi utama: SDM, teknologi digital dan kolaborasi multi-pihak. Ketiga dimensi ini saling melengkapi untuk menghasilkan pilar sosial yang tangguh dan adaptif di era disrupsi.

Secara simultan pada tiga dimensi utama: SDM, teknologi digital dan kolaborasi multi-pihak. Dimensi SDM diarahkan pada pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan digital, sehingga pilar sosial dapat berfungsi sebagai agen perubahan di tingkat lokal (Moleong, 2017; Sumardjo & Saharudin, 2020). Dimensi teknologi digital memastikan penyuluhan sosial beradaptasi dengan era disrupsi melalui digitalisasi layanan, kampanye sosial daring dan pemanfaatan big data (Kitchin, 2014; Lestari, 2021). Dimensi kolaborasi multi-pihak memberikan ekosistem dukungan yang komprehensif, dengan melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, LSM dan masyarakat sipil (Bryson et al., 2014; Ansell & Gash, 2008). Ketiga dimensi ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terintegrasi untuk menciptakan pilar sosial yang tangguh dan berdaya saing di tengah perubahan global.

Strategi penguatan pilar sosial harus berorientasi pada transformasi sistemik. Segitiga strategi memberikan arah konseptual, sedangkan tabel perbandingan memberikan bukti operasional tentang perbedaan signifikan antara kondisi sektoral lama dengan kondisi sistemik baru. Dengan mengintegrasikan penguatan SDM, teknologi digital dan kolaborasi multi-pihak, pilar sosial akan mampu menjadi garda terdepan yang tidak hanya menjalankan program, tetapi juga membangun ketahanan sosial masyarakat secara berkelanjutan di era disrupsi.

Transformasi Penyuluhan Sosial. Model konseptual transformasi penyuluhan sosial berbasis sistemik disusun sebagai jawaban atas tantangan kompleks era disrupsi, sekaligus sebagai kerangka integratif yang dapat digunakan untuk memperkuat peran pilar-pilar sosial di masa kini maupun mendatang. Model ini berangkat dari kelemahan penyuluhan sosial konvensional yang cenderung parsial, informatif dan sektoral, menuju paradigma baru yang bersifat inklusif, kolaboratif dan berbasis data.

Model ini mengintegrasikan empat komponen kunci: (1) Input Sistemik, (2) Proses Transformasi, (3) Output dan Outcome serta (4) Mekanisme Feedback. Input Sistemik meliputi regulasi yang adaptif, SDM yang kompeten, sarana prasarana memadai serta teknologi digital yang mendukung big data dan komunikasi daring. Proses Transformasi berlangsung melalui implementasi KIME (Komunikasi, Informasi, Motivasi, Edukasi) yang dipadukan dengan teknologi digital dan pendekatan partisipatif. Di sini, integrasi lintas sektor dan multi-aktor menjadi kunci utama agar penyuluhan tidak lagi berjalan sektoral, melainkan sistemik. Output yang dihasilkan berupa peningkatan literasi sosial, keterlibatan masyarakat dan efektivitas penyampaian program. Outcome jangka panjangnya adalah terbentuknya pilar sosial yang tangguh, ketahanan sosial masyarakat dan keberlanjutan program pemberdayaan. Feedback diperoleh melalui mekanisme monitoring, evaluasi berbasis data serta pembelajaran kebijakan yang terus diperbarui sesuai dinamika sosial.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyuluhan sosial di Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjawab kompleksitas permasalahan sosial di era disrupsi. Praktik penyuluhan konvensional yang bersifat sektoral, parsial dan top-down terbukti kurang mampu memberikan respons yang cepat, adaptif dan inklusif terhadap dinamika perubahan sosial, ekonomi dan teknologi. Kinerja pilar-pilar sosial seperti TKSK, PKH, PSM, Tagana dan Karang Taruna masih terbatas akibat rendahnya literasi digital, minimnya kapasitas teknis dan manajerial serta keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa transformasi penyuluhan sosial merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan tambahan.

Transformasi yang dimaksud adalah perubahan paradigma dari penyuluhan konvensional menuju penyuluhan sosial berbasis sistemik yang didasarkan pada konsep KIME. Pendekatan sistemik ini menekankan keterpaduan antara input, proses, output, outcome dan feedback, dengan integrasi dimensi SDM, teknologi digital dan kolaborasi multi-aktor. Temuan menunjukkan bahwa penerapan system thinking memungkinkan penyuluhan sosial menjadi lebih adaptif, berbasis data dan berorientasi pada nilai publik. Selain itu, penggunaan teknologi digital seperti media sosial, big data, aplikasi daring dan integrasi DTKS-SLRT terbukti memperluas jangkauan, meningkatkan efektivitas serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas program.

Dampak utama dari transformasi sistemik ini adalah munculnya penyuluhan sosial yang lebih inklusif, partisipatif dan berkelanjutan. Pilar-pilar sosial yang diperkuat melalui peningkatan kapasitas, pemanfaatan teknologi serta dukungan ekosistem kolaboratif akan mampu menjadi agen perubahan sosial yang diakui masyarakat. Dengan demikian, penyuluhan sosial dapat menjadi motor penggerak pembangunan kesejahteraan sosial sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat di tengah ketidakpastian era disrupsi.

Rekomendasi kebijakan. Pertama, perlu adanya dukungan regulasi yang adaptif dan berorientasi pada integrasi program penyuluhan sosial. Pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, perlu memperkuat regulasi mengenai standar kompetensi penyuluh sosial, mekanisme kolaborasi lintas sektor serta tata kelola data sosial. Peraturan perundangan seperti UU No. 11/2009, Permensos No. 10/2014 dan Permensos No. 16/2017 harus diperkuat implementasinya dengan kebijakan turunan yang lebih operasional dan kontekstual.

Kedua, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung pelatihan berkelanjutan, penyediaan sarana prasarana digital serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi. Tanpa dukungan finansial yang cukup, transformasi penyuluhan sosial berisiko terhenti di level wacana.

Ketiga, perlu dilakukan integrasi program antarunit di Kemensos dan lintas kementerian agar penyuluhan sosial tidak berjalan sektoral. Mekanisme koordinasi harus melibatkan Kementerian Pendidikan, Kesehatan, Pertanian serta kementerian/lembaga lain yang relevan, sehingga program penyuluhan sosial benar-benar mencerminkan pendekatan sistemik.

Rekomendasi Teknis. Pertama, dari sisi teknis diperlukan penguatan kapasitas SDM penyuluh sosial melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi profesi, on the job training serta peningkatan literasi digital. Hal ini penting agar pilar sosial dapat menguasai keterampilan teknis, manajerial, sekaligus adaptif terhadap dinamika sosial.

Kedua, perlu adanya inovasi metode penyuluhan sosial dengan memanfaatkan pendekatan partisipatif dan teknologi. Misalnya, penggunaan metode *microlearning* berbasis aplikasi, kampanye sosial melalui media digital dan penerapan *gamification* untuk meningkatkan motivasi masyarakat.

Ketiga, perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi digital melalui integrasi sistem data nasional seperti DTKS, SLRT dan Puskesmas. Analisis big data dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan sasaran, memprediksi tren sosial serta mengevaluasi efektivitas program secara real time. Dengan demikian, penyuluhan sosial dapat lebih tepat sasaran dan berbasis bukti (*evidence-based*).

Rekomendasi Akademis. Pertama, diperlukan riset lanjutan untuk memperkuat basis pengetahuan tentang penyuluhan sosial berbasis sistemik. Riset ini dapat meliputi studi komparatif internasional, evaluasi model-model penyuluhan digital serta kajian tentang efektivitas kolaborasi multi-aktor dalam penyuluhan sosial.

Kedua, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan sosial perlu mengembangkan kurikulum penyuluhan sosial yang responsif terhadap era disrupsi. Kurikulum harus menekankan pada literasi digital, analisis kebijakan, komunikasi publik serta keterampilan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, calon penyuluh sosial akan lebih siap menghadapi tantangan lapangan.

Ketiga, perlu adanya sinergi antara akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan dalam mengembangkan model penyuluhan sosial. Forum ilmiah seperti seminar, kongres dan publikasi di jurnal nasional terakreditasi harus dimanfaatkan sebagai ruang untuk berbagi temuan, praktik baik dan gagasan inovatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456.
- Castells, M. (2010). *The rise of the network society*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Checkland, P. (2000). *Soft systems methodology: A thirty year retrospective*. *Systems Research and Behavioral Science*, 17(1), 11–58.
- Christensen, C. M. (1997). *The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail*. Boston: Harvard Business Review Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55\*(1), 68–78.
- Freire, P. (2005). *Education for critical consciousness*. London: Continuum.
- Habibullah, H., Irmayani, N. R., Mujiyadi, B., Erwinsyah, R. G., & Nurhayu. (2022). The role of community social extension workers to promote social welfare programs in rural Indonesia. *EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology*.
- Hall, A. (2014). Brazil's Bolsa Família: A double-edged sword? *Development and Change*, 45(2), 303–325.
- Head, B. W., & Alford, J. (2015). Wicked problems: Implications for public policy and management. *Administration & Society*, 47(6), 711–739.
- Head, B. W., & Alford, J. (2015). Wicked problems: Implications for public policy and management. *Administration & Society*, 47(6), 711–739.
- Hidayat, R., & Sudrajat, T. (2021). Pendekatan sistem dalam pembangunan kesejahteraan sosial. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2), 155–170.

- Kitchin, R. (2014). *The data revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences*. London: Sage.
- Lee, J. (2017). Digital government in South Korea: Evaluation of e-government services. *Government Information Quarterly*, 34(3), 1–9.
- Lestari, P. (2021). Digital communication and social empowerment: The role of ICT in extension services. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 19(2), 145–160.
- Mardikanto, T. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Essex: Pearson Education.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Sosial.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). New York: Free Press.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- Senge, P. M. (2006). *The fifth discipline: The Art & Practice of the Learning Organization*. New York: Doubleday.
- Senge, P. M. (2006). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. New York: Doubleday.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Støren-Vaczy, B. (2024). Digital competences of future social workers: The art of education in uncertain times. *Social Work Education*.
- Sumardjo, & Saharudin. (2020). *Penyuluhan pembangunan di era disrupsi*. Bogor: IPB Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.